

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
(Studi di Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)**

(Skripsi)

Oleh

ALEK SANJAYA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)

OLEH

ALEK SANJAYA

Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran memperoleh juara pertama nasional lomba desa tingkat regional 1 Sumatera. Salah satu indikator penilaian lomba desa adalah pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pemberdayaan masyarakat dan upaya memberdayakan masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa Gunungrejo. Tipe penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Gunungrejo menerapkan program-program pemberdayaan masyarakat, yakni pemanfaatan pekarangan rumah, tabungan masyarakat, ternak sapi dan kambing, budidaya ikan lele, tanaman kolektif masyarakat, lomba dusun, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, dan pengembangan wisata. Upaya yang dilakukan adalah memberikan edukasi dan motivasi melalui sosialisasi-sosialisasi, memberikan dorongan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga desa berupa bantuan, membentuk kelompok masyarakat, membuka wisata, mendorong setiap dusun untuk memiliki dana kas dusun. Melakukan pelatihan-pelatihan bagi aparatur dan lembaga-lembaga desa, dan meningkatkan pendidikan aparatur desa. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui tersedianya sarana air bersih, posyandu, dan jaminan kesehatan masyarakat. Akses-akses kemajuan ekonomi bagi masyarakat yang telah dibuka yaitu melalui sebagian program-program pemberdayaan masyarakat, pasar desa, wisata dan badan usaha milik desa. Desa Gunungrejo telah membangun sarana dan prasarana untuk menunjang program pemberdayaan masyarakat diantaranya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas wisata, fasilitas pemberdayaan dan infrastruktur. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah dusun. Memelihara pemberdayaan dengan aturan-aturan dan kesepakatan-kesepakatan.

Kata Kunci : Upaya, Pemberdayaan, Masyarakat, Desa.

ABSTRACT

EMPOWERMENT OF COMMUNITY IN VILLAGE DEVELOPMENT (STUDY IN GUNUNGREJO VILLAGE WAY RATAI SUB-DISTRICT PESAWARAN DISTRICT)

BY

ALEK SANJAYA

The village of Gunungrejo Way Ratai Subdistrict in Pesawaran District won the first place in the national level 1 race village in Sumatra. One indicator of the assessment of village competitions is community empowerment. This study aims to find out about community empowerment programs and efforts to empower the community by the Gunungrejo Village Government. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The results of this study indicate that the Gunungrejo Village Government implements community empowerment programs, namely the use of home yards, community savings, cattle and goats, catfish farming, community collective plants, hamlet competitions, small and medium micro business development, and tourism development. The efforts made were to provide education and motivation through socialization, to encourage the community and village institutions in the form of assistance, to form community groups, to open tourism, to encourage each hamlet to have hamlet cash funds. Conduct training for village officials and institutions and improve the education of village officials. Improve the level of public health through the availability of clean water facilities, posyandu, and community health insurance. Access to economic progress for the community that has been opened is through some community empowerment programs, village markets, tourism, and village-owned enterprises. Gunungrejo Village has built facilities and infrastructure to support community empowerment programs including educational facilities, health facilities, tourist facilities, empowerment facilities and infrastructure. Increasing community participation in decision making through hamlet deliberations. Maintain empowerment with rules and agreements.

Keywords: Effort, Empowerment, Community, Village.

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
(Studi di Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)**

Oleh

ALEK SANJAYA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

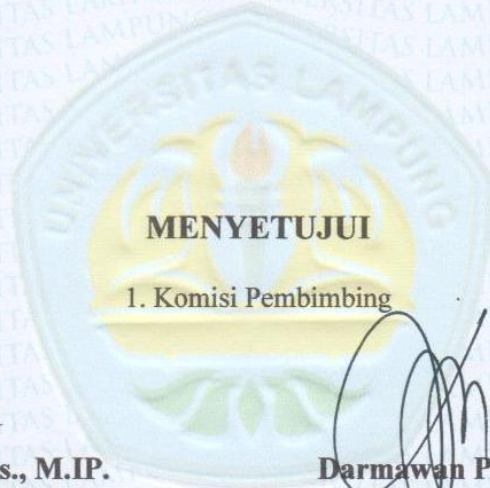
Judul Skripsi : **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DESA
(Studi di Desa Gunungrejo Way Ratai Kabupaten
Pesawaran)**

Nama Mahasiswa : **Alek Sanjaya**

No. Pokok Mahasiswa : **1516021007**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Budi Harjo, S.Sos., M.IP.
NIP 19680112 199802 1 001

Darmawan Purba, S.IP., M.IP.
NIP 19810601 201012 1 003

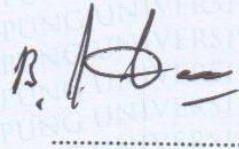
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

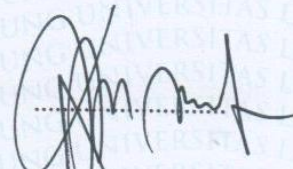
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

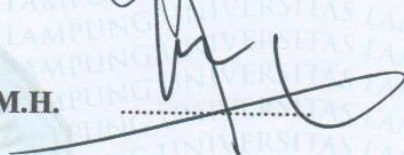
Ketua : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**



Sekretaris : **Darmawan Purba, S.IP., M.IP.**



Penguji : **Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr Syarif Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **08 Mei 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 08 Mei 2019

Yang Membuat Pernyataan



Alek Sanjaya
NPM. 1516021007

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Alek Sanjaya. Lahir di Sukajaya pada tanggal 24 Februari 1998 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Sutarno (Alm) dan Ibu Martiana. Pendidikan Formal yang penulis tempuh dimulai dari Sekolah Dasar di SD Negeri Sukajaya tahun 2003-2009, Sekolah Menengah Pertama di MTS Negeri Kotabatu pada tahun 2009 dan lulus di tahun 2012. Selanjutnya, pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Sukau pada tahun 2012 dan lulus di tahun 2015.

Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur masuk seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN). Penulis aktif berorganisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung (BEM U KBM UNILA) tahun 2015-2016, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Fisip (BEM F) tahun 2015-2016, dan Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI) tahun 2015-2016. Penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karang Anyar, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain), dan hanya pada tuhanmulah engkau berharap.”

(QS.Al-Insyirah [94]: 5-8)

“Watak keras belum tentu bisa tegas, tetapi lemah lembut tak jarang bisa tegas”
(Muhammad SAW)

“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar”
(Umar bin Khattab)

“Jadi pemimpin bukan tentang kekuasaan apalagi kekayaan, tetapi tentang ibadah, pengabdian dan pertanggungjawaban”
(Alek Sanjaya)

“Berjalanlah untuk dunia dan berlailah untuk akhirat”
(Alek Sanjaya)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamiin telah engkau ridhai yaa Allah langkah hambamu, sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu.

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat.

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta serta adikku yang ku sayangi sebagai tanda bakti, hormat dan cintaku.

Terima kasih atas doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan.

Kepada seluruh keluarga besar, terimakasih selalu memberikan dukungan, bantuan, motivasi, doa, dan perhatian sehingga aku semakin percaya diri dalam melanjutkan pendidikan.

Terimakasih untuk seluruh dosen, staff atau karyawan dan teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA



Alhamdulillahil'alamin, puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)**”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas tuntunan dan pengetahuannya sehingga kita dapat berada dijamin yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai bentuk adanya keterbatasan kemampuan serta sebagai motivasi untuk lebih baik dan terus belajar kedepannya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembacanya dan sebagai perkembangan penelitian dalam kajian ilmu sosial dan ilmu politik khususnya pada ilmu pemerintahan.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan kesalahan, namun dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang selalu memberikan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP., selaku pembimbing utama penulis. Terima kasih atas kesabaran yang selalu diberikan dalam mendidik penulis, terlebih lagi ilmu yang telah diberikan kepada penulis, dan terima kasih untuk semangat yang selalu diberikan untuk bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu serta meluangkan banyak waktu, tenaga serta pikiran untuk membantu dalam proses pembelajaran mengenai tema penelitian ini untuk jauh lebih baik dari sebelumnya.
4. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP., selaku pembimbing kedua penulis. Terima kasih atas kesabaran yang selalu diberikan dalam mendidik penulis, terlebih lagi meluangkan banyak waktu, tenaga maupun pikiran dalam memberikan banyak masukan guna terciptanya skripsi ini. Terimakasih juga atas kebaikan dan rasa pengertian yang bapak berikan kepada penulis.

5. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H., selaku dosen pembahas yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik dan saran. Terimakasih telah memberikan kontribusi dalam perbaikan skripsi saya menjadi lebih baik dan terstruktur. Masukan dan saran perbaikan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan hingga tugas akhir.
7. Seluruh dosen-dosen jurusan Ilmu Pemerintahan, Terimakasih untuk ilmu yang telah diberikan kepada penulis. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat penulis implementasikan dan bermanfaat bagi Pemerintahan Indonesia.
8. Seluruh Narasumber penelitian : kepala desa gunungrejo, ketua badan permusyawaratan desa gunungrejo, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat desa gunungrejo, sekretaris desa gunungrejo, kepala urusan kemasyarakatan desa gunungrejo, kepala dusun di desa gunungrejo, masyarakat desa gunungrejo, ketua badan usaha milik desa gunungrejo, sekretaris karang taruna desa gunungrejo, ketua pembinaan kesejahteraan keluarga desa gunungrejo, ketua gabungan kelompok tani desa gunungrejo, pemilik usaha mikro kecil dan menengah di desa gunungrejo, yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data primer maupun data sekunder, semoga Allah membalas jasa bapak dan ibu dengan segala kebaikan.

9. Teristimewa untuk kedua orangtuaku, Ayahanda Sutarno (Alm) dan Ibunda Martiana, terimakasih atas segala doa, cinta, kasih sayang, dukungan dan semangat serta perhatian yang tidak mampu penulis balas segala jasa dan kebaikan kalian. Semoga Allah SWT menempatkan ayahanda disisi Allah SWT yang paling mulia, dan Ibunda selalu diberikan perlindungan, kesehatan, keselamatan dan kasih sayang-Nya serta balasan atas segala jasa dan kebaikan Ibunda.
10. Adik kandung penulis, Piranti Sari wanita yang kuat. Terima kasih atas segala doa, semangat, cinta dan kasih sayang yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kekuatan dan kemudahan dalam segala urusan sehingga kita mampu menjadi anak yang membanggakan orangtua kita dan juga semoga dipermudah jalannya dalam mencapai semua apa yang telah diharapkan.
11. Keluarga besar SMA Negeri 1 Sukau, MTs Negeri 02 OKU Selatan, dan SD Negeri Sukajaya, khususnya guru-guruku dan teman-temanku terimakasih atas perhatian, ilmu, kasih sayang dan motivasi yang telah diberikan dan selalu menjaga persaudaraan.
12. Seluruh mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan khususnya angkatan 2015 kelas ganjil maupun genap yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberi semangat, terimakasih atas ilmu, waktu, doa, kerjasama dan kebersamaannya selama ini.

13. Grup Anak Sholeh yang terdiri dari Deby, Fajar, Robi, dan Riko tetaplah hijrah dalam kebaikan dan semoga kita dapat bertemu di Surga-nya Allah SWT. Jika ada diantara kita yang tidak kita temukan di surga beritahu allah bahwa kita pernah bersama dalam hijrah kepada kebaikan.

Bandar Lampung, 08 Mei 2019

Penulis,

Alek Sanjaya

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pemberdayaan Masyarakat.....	13
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	13
2. Tujuan Pemberdayaan	15
3. Proses Pemberdayaan	18
B. Pembangunan Desa	26
C. Kerangka Pikir.....	29
III. METODE PENELITIAN	35
A. Tipe Penelitian.....	35
B. Fokus Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	39
D. Jenis Data	40
E. Informan	41
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Pengolahan Data	45
H. Teknik Analisis Data	46
I. Teknik Keabsahan Data	48
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	50
A. Sejarah Singkat Desa Gunungrejo.....	50
B. Struktur Pemerintahan Desa Gunungrejo.....	51

C.	Keadaan Umum Wilayah Desa Gunungrejo	52
1.	Luas dan Batas Wilayah Desa Gunungrejo.....	52
2.	Orbitrasi Desa Gunungrejo.....	53
D.	Keadaan Penduduk Desa Gunungrejo.....	54
1.	Keadaan Umum Penduduk.....	54
2.	Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama	54
3.	Keadaan Penduduk Berdasarkan Golongan Umur	55
4.	Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	55
E.	Sarana dan Prasarana Desa Gunungrejo.....	56
F.	Kelembagaan.....	57
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A.	Program-Program Pemberdayaan Masyarakat.....	60
1.	Pemanfaatan Pekarangan Rumah	60
2.	Tabungan Masyarakat (Tamasya)	66
3.	Ternak Kambing dan Sapi.....	69
4.	Budidaya Ikan Lele	74
5.	Tanaman Kolektif Masyarakat	78
6.	Lomba Dusun	80
7.	Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	84
8.	Pengembangan Wisata	88
B.	Upaya Memberdayakan Masyarakat.....	96
1.	Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling).....	98
2.	Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering).....	113
3.	Memberdayakan mengandung pula arti melindungi.....	135
VI.	SIMPULAN DAN SARAN	150
A.	Simpulan.....	150
B.	Saran.....	151

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perubahan Status Kemajuan Desa Tahun 2014 dan 2017 Menurut Kabupaten/Kota.....	4
2. Daftar Juara Nasional Lomba Desa Tingkat Regional 1 Wilayah Sumatera Tahun 2017	9
3. Indikator dari Upaya Memberdayakan Masyarakat.....	39
4. Daftar informan penelitian	43
5. Nama-nama Kepala Desa di Desa Gunungrejo	51
6. Luas Wilayah Desa Gunungrejo	52
7. Batas Wilayah Desa Gunungrejo	53
8. Dusun-Dusun di Desa Gunungrejo	53
9. Jumlah Penduduk Desa Gunungrejo	54
10. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama yang dianut	55
11. Jumlah Penduduk berdasarkan Golongan Umur.....	55
12. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	56
13. Kelembagaan di Desa Gunungrejo	57
14. Program-Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Gunungrejo	93
15. Pelatihan-Pelatihan Yang Dilakukan Pemerintah Desa Gunungrejo.....	116
16. Analisis Teori Upaya Memberdayakan Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gunungrejo	143
17. Triangulasi Data Penelitian	146

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Model Kerangka Pikir.....	34
2. Pemanfaatan Pekarangan Rumah.....	65
3. Ternak kambing yang dikelola masyarakat	71
4. Ternak sapi yang dikelola oleh gabungan kelompok tani.....	73
5. Budidaya ikan lele yang dikelola masyarakat.....	76
6. Tanaman kolektif masyarakat	79
7. Logo produk jamu herbal.....	87
8. Lokasi wisata air terjun anglo	89
9. Polybag yang sudah digunakan.....	107
10. Hewan kambing yang dipelihara masyarakat	107
11. Kegiatan posyandu Desa Gunungrejo.....	118
12. Salahsatu sisi pasar desa	120
13. Lokasi berjualan di area wisata air terjun	121
14. Bendungan di lokasi air terjun	122
15. Perpustakaan Desa Gunungrejo	123
16. Bangunan kandang ternak sapi	125
17. Mesin gilingan dan bangunan produksi jamu	125
18. Musyawarah Dusun	130
19. Musyawarah Desa	131

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional pasal 1 ayat 2 bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pembangunan nasional pada dasarnya ialah pembangunan Indonesia dan pembangunan masyarakat seutuhnya, pembangunan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat dan bangsa Indonesia, yaitu potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Melalui program-program peningkatan potensi sumber daya yang dimiliki maka tujuan bangsa Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat, bangsa, dan negara akan tercapai.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan peluang yang besar kepada daerah-daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sampai pada level terendah tanpa mencederai konstitusi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas

desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah.

Desentralisasi tidak hanya terbatas pada tingkat kabupaten/kota tetapi juga desa sebagai wilayah otonomi asli. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pembangunan pedesaan seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat harus dipandang sebagai upaya untuk mempercepat dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga efektivitasnya memiliki signifikansi yang besar terhadap penanggulangan kemiskinan.

Sasaran dari program pemberdayaan sendiri ialah masyarakat yang dinilai lemah dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Masyarakat yang masih lemah dan belum berdaya biasanya masih bergantung terhadap bantuan dan program yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan program pemberdayaan yang dapat memandirikan masyarakat, sehingga masyarakat tidak akan bergantung pada program-program dari pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari program pemberdayaan.

Berbagai program pengentasan kemiskinan sudah digelontorkan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu prioritas program pemerintah Provinsi Lampung adalah membangun dari desa. Desa menjadi basis pembangunan dengan memberdayakan semua fungsi pelayanan publik pada tingkat desa dari hal yang mendasar (prasarana dan sarana) hingga ke kelengkapan administratif pemerintahan desa (kelembagaan). Dengan membangun desa diharapkan mempermudah akses masyarakat pada kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

Dengan jumlah desa 2.435 dan kelurahan 205 tentunya harus ditetapkan skala prioritas sehingga lebih fokus pada desa yang masih terbelakang. Kemajuan dan perubahan status ketertinggalan desa menjadi sebuah harapan besar

pemerintah daerah Provinsi Lampung. Hal ini tentu sejalan dengan visi pemerintah daerah Provinsi Lampung yaitu “Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019”. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memantau lebih jauh bagaimana perkembangan desa-desa tertinggal yang telah mendapat guliran dana Gerbang Desa. Dari hasil pemutakhiran terhadap 380 desa/kelurahan tertinggal oleh Dinas Pemberdayaan Pemerintah Desa yang dibantu oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, terlihat pemerintah berhasil mengangkat 261 desa tertinggal menjadi tidak tertinggal (Dilansir dari laman dpmd.lampungprov.go.id). Gambaran lengkap perubahan status desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perubahan Status Kemajuan Desa Tahun 2014 dan 2017 menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Kondisi Desa Tertinggal 2014	Kondisi Status Desa 2017			
		Maju	Berkembang	Kurang Berkembang	Tertinggal
Lampung Barat	38	0	5	14	19
Tanggamus	100	2	22	48	28
Lampung Selatan	13	0	5	5	3
Lampung Timur	2	0	0	2	0
Lampung Tengah	8	0	2	3	3
Lampung Utara	48	0	10	28	10
Way Kanan	28	0	4	15	9
Tulang Bawang	18	0	0	10	8
Pesawaran	20	1	5	11	3
Pringsewu	4	0	0	3	1
Mesuji	31	1	4	17	9
Tulang Bawang Barat	13	0	4	6	3
Pesisir Barat	56	1	8	24	23
Bandar Lampung	1	0	1	0	0
Lampung	380	5	70	186	119

Sumber : dpmd.lampungprov.go.id. Diolah Peneliti, 2018.

Sebagian besar desa yang mengalami perubahan status menjadi bukan desa tertinggal, dan sebagian lainnya masih berada pada status tertinggal. Namun

sebagian besar desa yang mengalami perubahan, hanya naik setingkat di atasnya yaitu menjadi desa kurang berkembang. Tentu hal tersebut harus segera diselesaikan untuk mewujudkan desa yang maju dan mandiri. Pembangunan aspek sarana wilayah menjadi perhatian utama, yang terlihat dari mayoritas desa mengalami kenaikan indeks pada aspek tersebut. Aspek lain yang mendapat porsi yang juga besar adalah aspek sosial ekonomi masyarakat. Variabel yang menjadi perhatian pemerintah desa untuk dikembangkan pada beberapa aspek, yaitu aspek mengenai prasarana dasar, aspek mengenai sarana wilayah, aspek mengenai sosial ekonomi masyarakat, aspek mengenai lingkungan, dan aspek mengenai kelembagaan.

Melihat dari sisi kependudukan, jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung masih tinggi. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung menjelaskan bahwa persentase penduduk miskin Provinsi Lampung bulan maret 2018 mencapai 13,14 persen. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan) di Lampung mencapai 1.097,05 ribu orang (13,14 persen), bertambah sebesar 13,31 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 1.083,74 ribu orang (13,04 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 9,13 persen naik menjadi 9,27 persen pada Maret 2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 14,56 persen naik menjadi 14,76 persen pada Maret 2018.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Oleh karena itu, masyarakat yang demikian perlu diberdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali.

Penelitian terdahulu memberikan gambaran mengenai peran pemberdayaan masyarakat desa, penelitian yang dilakukan oleh Almasri dan Devi Deswimar (2014) tentang peran program pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan, menyatakan peran pemberdayaan masyarakat desa merupakan media pembelajaran dan pengembangan kemampuan para pelaku pembangunan, serta media mewujudkan masyarakat sebagai penggagas dalam sebuah kegiatan pembangunan.

Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di desa, masih terdapat banyak kendala dan masalah yang dihadapi, serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut, seperti minimnya investor maupun donator dalam kegiatan pemberdayaan, terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, terbatasnya kemampuan manajerial, kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya fasilitas penunjang dalam pemberdayaan masyarakat. Berikut

beberapa penelitian yang memberikan penjelasan mengenai masalah-masalah dalam pemberdayaan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Arsiyah (2009) tentang pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa, menyatakan bahwa kendala-kendala yang dihadapi adalah : Pertama, kendala internal, yakni terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia, keterbatasan kemampuan manajerial, tidak adanya kemampuan mengelola peluang pasar yang ada dan terbatasnya modal usaha yang dimiliki. Kedua, kendala eksternal, belum adanya pihak swasta yang benar-benar memberikan bantuan modal usaha sebagai partisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Baura, dkk (2015) tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana desa, menyatakan hasil penelitiannya bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukumatiti, pemerintah desa tidak pernah melibatkan masyarakat dalam bentuk proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pada evaluasi hasil yang dicapai.

Penelitian yang dilakukan Mikhael Wurangian (2015) tentang strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat, dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa para petani Desa Basaan Satu terkesan kurang partisipatif mengikuti kegiatan/program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini disebabkan oleh sikap apatis para petani, karena faktor kekecewaan mereka mengikuti program pemberdayaan sejenisnya, dengan

hasil produksi yang menurun, kerugian dibidang materi dimana modal untuk menanam tidak terpenuhi lagi.

Penelitian yang dilakukan Ita Ulumiyah, dkk (2013) tentang peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa, menyatakan faktor penghambat yang dihadapi pemerintah Desa Sumberpasir yaitu partisipasi masyarakat, budaya malas yang ada dalam diri masyarakat Desa Sumberpasir serta kurangnya fasilitas dalam menunjang kelancaran kegiatan yang ada di desa.

Beberapa penelitian di atas telah melakukan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat, terkait peran program pemberdayaan masyarakat, peran pemerintah desa, pemanfaatan alokasi dana desa, pembangunan ekonomi desa dan strategi pemerintah desa. Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, peneliti akan melakukan penelitian di desa yang sudah maju dan aktif dalam bidang pemberdayaan masyarakat, yang dapat dijadikan sebagai contoh bagi desa lain. Peneliti akan berfokus pada program-program pemberdayaan masyarakat dan upaya pemberdayaan masyarakat.

Peneliti merasa perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang pemberdayaan masyarakat terkait program-program pemberdayaan masyarakat dan upaya pemberdayaan masyarakat, agar disetiap program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri, dan program pemberdayaan yang digunakan sesuai dengan karakteristik masyarakat, lingkungan fisik dan sosial, beragam kebutuhan-kebutuhan, serta tujuan yang diinginkan.

Desa Gunungrejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Desa Gunungrejo memiliki luas tanah 1343,41 Ha terdiri dari lahan pemukiman, persawahan, kuburan, pekarangan, perkantoran dan perkebunan. Masyarakat Desa Gunungrejo lebih dari 80% bermata pencaharian sebagai petani baik pemilik lahan, penggarap tanah maupun buruh. Melihat potensi yang ada di Desa Gunungrejo, Pemerintah Desa Gunungrejo memiliki beberapa program pemberdayaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat Desa Gunungrejo dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Dilansir dari Gunungrejo.desa.id).

Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran setiap tahunnya mengikuti lomba desa ditingkat Kabupaten Pesawaran tetapi belum mampu mengungguli desa-desa yang lainnya. Pada tahun 2016 desa yang unggul adalah Desa Hanura, baik ditingkat Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung maupun Nasional. Namun pada tahun 2017 Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran mampu mengungguli desa-desa yang lain dan berhasil meraih juara pertama nasional Lomba Desa Regional 1 Wilayah Sumatera Tahun 2017. Daftar juara nasional Lomba Desa Tingkat Regional Wilayah Sumatera tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Daftar Juara Nasional Lomba Desa Tingkat Regional 1 Wilayah Sumatera Tahun 2017

Juara Lomba Desa	Nama Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	Gunungrejo	Way Ratai	Pesawaran
2	Buding	Kelapa Kampit	Belitung Timur
3	Toapaya Selatan dan Toapaya Asri	Toapaya	Kepulauan Riau

Sumber : www.lampungprov.go.id , www.babelprov.go.id,
www.bintankab.go.id. Diolah dari berbagai sumber, 2018.

Desa Gunungrejo berhasil meraih juara pertama nasional Lomba Desa Tingkat Regional 1 Wilayah Sumatera Tahun 2017, mengungguli Desa Buding Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur, dan Desa Toapaya Selatan dan Desa Toapaya Asri Kecamatan Toapaya Kabupaten Kepulauan Riau. Tidak sekedar menghias desa dengan warna-warni keramaian. Lomba desa sendiri memiliki beberapa indikator penilaian, jadi desa yang mengikuti lomba desa akan dinilai berdasarkan indikator tersebut.

Permendagri Nomor 81 tahun 2015, indikator penilaian merujuk pada evaluasi tiga bidang yakni, evaluasi bidang pemerintahan desa, evaluasi bidang kewilayahan desa dan kelurahan, dan evaluasi bidang kemasyarakatan desa dan kelurahan. Evaluasi bidang pemerintahan desa dinilai dari administrasi pemerintahan desa, kinerja dari perangkat desa, inisiatif memberdayakan masyarakat, teknologi e-government.

Lalu evaluasi bidang kewilayahan, desa dilihat dari ciri khas identitas desa (usaha mikro, kecil dan menengah, makanan, minuman) dan inovasi-inovasi desa. Terakhir evaluasi bidang kemasyarakatan penilaian dilihat dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan desa, baik itu organisasi maupun mandiri. Selain itu desa juga dinilai dari peningkatan ekonomi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di desa (dilansir dari www.rakyatmuria.com).

Beberapa indikator di atas telah terpenuhi oleh Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran sehingga Desa Gunungrejo meraih Juara Pertama Nasional Lomba Desa Regional 1 Wilayah Sumatera. Berdasarkan beberapa pencapaian prestasi yang diperoleh Desa Gunungrejo, maka Desa

Gunungrejo dapat dikategorikan menjadi desa unggul dan layak dijadikan sebagai desa percontohan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apa saja program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Gunungrejo?
2. Bagaimana upaya memberdayakan masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa Gunungrejo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Gunungrejo.
2. Mengetahui upaya memberdayakan masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa Gunungrejo

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis , penelitian ini memberikan pengetahuan tentang program-program pemberdayaan masyarakat dan upaya memberdayakan masyarakat. Selain itu, memberikan kontribusi pemikiran kepada akademisi maupun mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah desa, masyarakat setempat, dan pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Mardikanto dan Soebiato (2015:100) pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta meningkatkan posisi-tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari rekayasa pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat.

World Bank (dalam Theresia, dkk, 2015:117) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll.) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Subejo dan Narimo (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2015:75) mengemukakan bahwa terminologi pemberdayaan masyarakat kadang-kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (*community development*), yaitu proses dimana usaha-usaha orang-orang itu sendiri disatukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial dan kultural masyarakat, menyatukan masyarakat itu kedalam kehidupan bangsa, dan memungkinkan masyarakat itu menyumbangkan secara penuh bagi kemajuan nasional.

Pemberdayaan masyarakat oleh Slamet (dalam Mardikanto dan Sebiato, 2015:100) diartikan sebagai proses penyuluhan pembangunan yang oleh Mardikanto diartikan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi dan politik, untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua *stakeholders* (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Berdasarkan pengertian pemberdayaan masyarakat menurut para ahli di atas, peneliti berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah gerakan penguatan sosial agar masyarakat tadinya lemah, baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik, diberdayakan sehingga membangkitkan kesadaran masyarakat tersebut dan meningkatkan potensi

yang mereka miliki guna membangun serta menentukan tindakan berdasarkan keinginan mereka secara mandiri melalui strategi dan pendekatan tertentu yang dapat menjamin keberhasilan dalam bentuk kemandirian.

2. Tujuan Pemberdayaan

World Bank (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2015:110) mensyaratkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk terjaminnya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menyangkut :

- a. Perbaikan modal finansial, berupa perencanaan ekonomi-makro dan pengelolaan fiskal
- b. Perbaikan modal fisik, berupa prasarana, bangunan, mesin, dan juga pelabuhan
- c. Perbaikan modal sumber daya manusia, berupa perbaikan kesehatan dan pendidikan yang relevan dengan pasar kerja
- d. Pengembangan modal sosial, yang menyangkut : keterampilan dan kemampuan masyarakat, kelembagaan, kemitraan, dan norma hubungan sosial yang lain
- e. Pengelolaan sumber daya alam, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial bagi perbaikan kehidupan manusia termasuk : air bersih, energi, serat, pengelolaan limbah, stabilitas iklim, dan beragam layanan penunjangnya.

Mengacu pada konsep di atas, maka tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebiato (2015 : 111) meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut :

a. Perbaikan pendidikan (*better education*)

Bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan pemberdayaan tidak terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat. Namun demikian yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.

b. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*)

Melalui tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya. Utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.

c. Perbaikan tindakan (*better action*)

Berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.

d. Perbaiki kelembagaan (*better institution*)

Perbaiki kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.

e. Perbaiki usaha (*better business*)

Perbaiki pendidikan, perbaikan aksesibilitas, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

f. Perbaiki pendapatan (*better income*)

Terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

g. Perbaiki lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

h. Perbaiki kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

i. Perbaiki masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang baik pula.

3. Proses Pemberdayaan

Subejo dan Narimo (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2015:32) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses, menurut Jackson, Labonte, dan Rissel (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2015:268) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat melibatkan beberapa komponen, yaitu pemberdayaan personal, pengembangan kelompok kecil, pengorganisasian masyarakat, kemitraan, dan aksi sosial dan politik. Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan kemampuannya, diantaranya melalui pendayagunaan potensi lingkungan.

Menurut Suyono (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2015:255) Paling tidak ada tiga syarat dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Kesadaran, kejelasan serta pengetahuan tentang apa yang akan dilakukan.
2. Pemahaman yang baik tentang keinginan berbagai pihak termasuk masyarakat tentang hal-hal apa, dimana, dan siapa yang akan diberdayakan.
3. Adanya kemauan dan keterampilan kelompok sasaran untuk menempuh proses pemberdayaan.

Menurut Theresia, dkk (2015:119-121) upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai

peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.

Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasinya kedalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Jadi esensi pemberdayaan bukan

hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga termasuk penguatan pranata-pranatanya.

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*).

Menurut Parsons et.al (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2015:160) menyatakan, bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif, namun demikian tidak semua interpersi fasilitator dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien (penerima manfaat) dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya.

Zimmerman (dalam Sumaryo dan Kordiyana, 2015:28) mengemukakan bahwa proses pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) merupakan upaya membantu masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Proses pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memberikan kewenangan (*power*), aksesibilitas terhadap sumberdaya dari lingkungan yang akomodif.

Suharto (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2015:170) mengemukakan adanya 5 (lima) aspek penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu :

a. Motivasi

Dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa atau kelurahannya. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan diluar wilayahnya.

c. Manajemen diri

Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

d. Mobilisasi sumberdaya

Untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap

orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

e. Pembangunan dan pengembangan jejaring

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, menurut Suharto (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2015:171) kelima aspek pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui 5 (lima) P strategi pemberdayaan yaitu : Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan.

a. Pemungkinan

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

b. Penguatan

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

c. Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang apalagi tidak sehat antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat dan kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

d. Penyokongan

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

e. Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Mardikanto dan Soebiato (2015:172) menyimpulkan bahwa apapun strategi pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan, harus memperhatikan upaya-upaya :

- a. Membangun komitmen untuk mendapatkan dukungan kebijakan, sosial dan finansial dari berbagai pihak terkait.
- b. Meningkatkan keberdayaan masyarakat.
- c. Melengkapi sarana dan prasarana kerja para fasilitator.
- d. Memobilisasi dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di masyarakat.

B. Pembangunan Desa

Menurut Adisasmita (2006 : 67) Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.

Pembangunan masyarakat desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat.

Dengan cara ini peningkatan dan pengembangan desa swadaya ke desa swakarsa selanjutnya menuju ke desa swasembada dapat dipercepat terwujudnya. Pembangunan desa/kelurahan mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat.

Semakin disadari bahwa dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan keterlibatan masyarakat secara langsung pada setiap tahapan pembangunan di desa/kelurahan, mulai dari proses penyusunan rencana, pelaksanaan dan tindak lanjut pembangunan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Pada lingkup nasional, pembangunan nasional mendorong pembangunan regional, dan pembangunan regional adalah memperkokoh pembangunan nasional. Dalam lingkup yang lebih sempit, pembangunan kecamatan mendorong pembangunan desa, dan pembangunan desa adalah memperkokoh pembangunan kecamatan. Pada tingkat yang lebih atas dilakukan pendekatan pembangunan *top-down* (dari atas ke bawah), sedangkan pada tingkat bawah dilakukan pendekatan pembangunan *bottom-up* (dari bawah ke atas).

Pendekatan *top-down* masih diperlukan, khususnya untuk program-program pembangunan yang sifatnya vital atau yang terkait dengan kepentingan orang banyak atau yang merupakan pelayanan antar wilayah, misalnya pembangunan pelabuhan laut, bangunan pembangkit listrik, pembangunan jalan arteri primer, perumahan rakyat, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), dan lainnya. Karena program pembangunan pedesaan yang

dilakukan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka pendekatan pembangunan desa seharusnya bersifat *bottom-up* yang diperkuat dengan pendekatan partisipatif.

Pembangunan pedesaan dihadapi banyak sekali hambatan diantaranya yang paling mendesak yaitu :

1. Memperkecil kesenjangan ketimpangan antara desa dan kota dan antar pelaku pembangunan.
2. Merubah pola pembangunan dan pendekatan yang bersifat sentralistik dan auditor dasar teralisasi holistik dan partisipatif.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparat dan masyarakat untuk menunjang pembangunan dan pertumbuhan.
4. Meningkatkan pembangunan prasarana fisik dan penyebarannya yang mampu menjangkau ke berbagai pelosok.

Secara umum dapat dikatakan bahwa hambatan utama yang dihadapi daerah pedesaan adalah terbatasnya ketersediaan prasarana untuk mengembangkan kegiatan produksi dan akses pemasaran dan terbatasnya sarana pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan masyarakat desa harus terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong timbulnya prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat. Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan kemampuan masyarakat pedesaan untuk berproduksi serta mengolah dan memasarkan hasil produksinya, sekaligus menciptakan lapangan kerja.

1. Terwujudnya penguatan kelembagaan yang mencakup prosedur perencanaan yang melibatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal yang semakin berdaya mampu.
2. Percepatan pertumbuhan dari desa swadaya menjadi swakarya dan seterusnya menjadi desa swasembada.
3. Peningkatan keterampilan dalam produksi pertanian industri kecil dan lainnya serta pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif.

Membangunan pedesaan itu mempunyai ruang lingkup yang sangat luas tetapi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan meliputi pengairan, jaringan jalan dan lingkungan pemukiman.
2. Pemberdayaan masyarakat.
3. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM).
4. Penciptaan lapangan kerja kesempatan berusaha peningkatan pendapatan khususnya terhadap daerah pedesaan yang miskin.
5. Peningkatan keterkaitan antar daerah pedesaan dan antara daerah pedesaan dengan perkotaan (inter rural - regional - urban relationship).

C. Kerangka Pikir

Hasil pemutakhiran terhadap 380 desa/kelurahan tertinggal oleh Dinas Pemberdayaan Pemerintah Desa yang dibantu oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, terlihat pemerintah berhasil mengangkat 261 desa tertinggal menjadi tidak tertinggal (Dilansir dari laman

dpmd.lampungprov.go.id). Sebagian besar desa yang mengalami perubahan status menjadi bukan desa tertinggal, dan sebagian lainnya masih berada pada status tertinggal. Namun sebagian besar desa yang mengalami perubahan, hanya naik setingkat di atasnya yaitu menjadi desa kurang berkembang. Tentu hal tersebut harus segera diselesaikan untuk mewujudkan desa yang maju dan mandiri.

Melihat dari sisi kependudukan, jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung masih tinggi. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung menjelaskan bahwa persentase penduduk miskin Provinsi Lampung bulan maret 2018 mencapai 13,14 persen. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan) di Lampung mencapai 1.097,05 ribu orang (13,14 persen), bertambah sebesar 13,31 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 1.083,74 ribu orang (13,04 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 9,13 persen naik menjadi 9,27 persen pada Maret 2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 14,56 persen naik menjadi 14,76 persen pada Maret 2018.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Itu nampak pada banyak program pembangunan

yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Oleh karena itu, masyarakat yang demikian perlu diberdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, Peneliti merasa perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang pemberdayaan masyarakat terkait program-program pemberdayaan masyarakat dan upaya pemberdayaan masyarakat, agar disetiap program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri, dan program pemberdayaan yang dilakukan sesuai dengan karakteristik masyarakat, lingkungan fisik dan sosial, beragam kebutuhan-kebutuhan, serta tujuan yang diinginkan.

Menurut Theresia, dkk (2015:119-121) upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.

Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

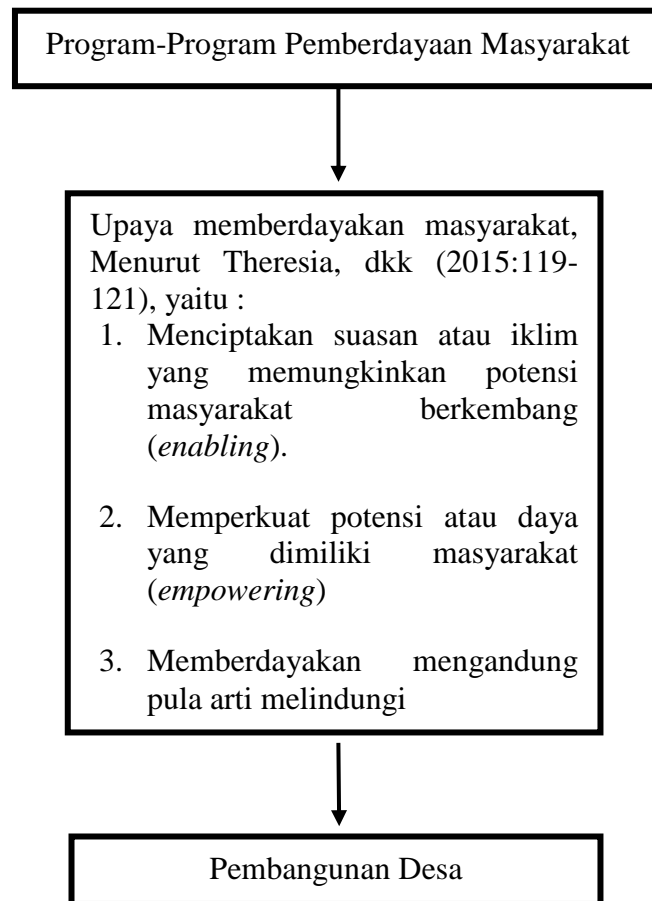
Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasinya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan

masyarakat di dalamnya. Terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Jadi esensi pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga termasuk penguatan pranata-pranatanya.

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*).

Ketika proses pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik, maka akan mendorong percepatan dalam pembangunan pedesaan. Semakin banyak program pemberdayaan masyarakat yang berhasil, maka akan mewujudkan desa yang mandiri. Pelaksanaan pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. Dengan

melihat indikator diatas, penjelasan kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Model Kerangka Pikir
Sumber :Diolah Peneliti tahun 2019.

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif–kualitatif. Menurut Mayer dan Greenwood (dalam Silalahi, 2012:27) deskriptif kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa. Pada dasarnya, deskripsi kualitatif melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi.

Mely G. Tan (Silalahi, 2012:28) mengatakan penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di teliti.

Sedangkan Moleong (2012:4) menyatakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu yang teliti secara holistik (utuh). Dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara deskriptif, tentang data yang didapatkan dari lokasi penelitian dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang di teliti.

B. Fokus Penelitian

Moleong (2012: 63) menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian untuk memilih data yang relevan, agar tidak dimasukkan kedalam data yang sedang dikumpulkan, walaupun data itu menarik. Fokus penelitian adalah untuk membatasi studi dan bidang penelitian, karena tanpa adanya fokus penelitian, maka penelitian akan terjebak pada melimpahnya volume data yang diperoleh di lapangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui program-program pemberdayaan masyarakat dan upaya memberdayakan masyarakat yang dilakukan di Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, dengan melihat tiga sisi dalam upaya memberdayakan masyarakat menurut Theresia, dkk, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat

(*empowering*), dan memberdayakan mengandung pula arti melindungi, dengan indikator sebagai berikut : .

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.

Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan,

pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasinya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Jadi esensi pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga termasuk penguatan pranata-pranatanya.

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak

seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*).

Indikator-indikator dari upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Indikator dari Upaya Memberdayakan Masyarakat

No.	Upaya Memberdayakan Masyarakat	Indikator
1	Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (<i>enabling</i>)	1. Mendorong masyarakat dan memotivasi masyarakat 2. Mengembangkan kesadaran masyarakat
2	Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (<i>empowering</i>)	1. Peningkatan taraf pendidikan 2. Peningkatan derajat kesehatan 3. Akses kedalam sumber-sumber ekonomi 4. Pembangunan sarana dan prasarana fisik 5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
3	Memberdayakan mengandung pula arti melindungi	1. Mendayagunakan 2. Melindungi 3. Memelihara

Sumber : Diolah Peneliti, 2018.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini, Peneliti menentukan pilihan di Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Penentuan lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Desa Gunungrejo merupakan desa yang menjuarai lomba desa tingkat nasional regional 1 Sumatera tahun 2017.

2. Pemberdayaan masyarakat di Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran tergolong aktif.
3. Desa tersebut menurut penulis mampu menjadi desa sebagai percontohan bagi desa lain dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

D. Jenis Data

Lofland (dalam Moleong, 2012: 157) jenis data dalam penelitian kualitatif terbagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Sumber data umum dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data utama dapat dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam *audio tapes*, pengambilan foto, atau film.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data primer.

Silalahi (2012:289) sumber primer adalah suatu objek atau dokumen original-material mentah dari pelaku yang disebut "*first-hand information*". Data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) dan catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Untuk memperoleh data primer, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang mewakili populasi. Informan ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan menggunakan

beberapa orang lain sebagai *key informan* atau perantara untuk dapat mengenal dan berhubungan langsung dengan informan.

b. Data sekunder

Silalahi (2012:291) Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tersedia dinamakan data sekunder. Data sekunder meliputi komentar, interpretasi atau pembahasan tentang materi original. Data sekunder dapat diperoleh melalui catatan-catatan, arsip, dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan sebagai pendukung dalam analisis data primer.

E. Informan

Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Sanggar Kanto (dalam Burhan Bungin, 2003: 53), menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak bermaksud menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih fokus kepada representasi terhadap fenomena sosial.

Prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana peneliti menentukan informan kunci atau *key informan* atau situasi sosial tertentu yang syarat dengan informasi yang relevan dengan penelitian. Informan dalam penelitian kualitatif ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*) jika dalam tahap

pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi maka penelitian dapat dikatakan telah mendapatkan sebuah kesimpulan. Menentukan informan peneliti menggunakan beberapa kriteria yaitu dengan pertimbangan tertentu sehingga diperoleh gambaran informan-informan, sebagai berikut:

1. Informan yang mengetahui tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.
2. Informan yang telah ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.
3. Masyarakat dipilih sesuai dengan mempertimbangkan keterwakilan jawaban atau informasi terkait pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Pemerintah Desa Gunungrejo, aparatur dusun Desa Gunungrejo, lembaga-lembaga masyarakat Desa Gunungrejo, dan masyarakat Desa Gunungrejo. Secara keseluruhan pihak-pihak tersebut dianggap sudah cukup untuk mewakili ciri keseluruhan orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Gunungrejo..

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 4. Daftar informan penelitian

No.	Informan	Jabatan	Tanggal Wawancara
1.	Sanarak	Badan Permusyawaratan Desa	14 Januari 2019
2.	Suprpto	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	13 Januari 2019
3.	Suranto, S.T., M.H.	Kepala Desa	14 Januari 2019
4.	Munardi	Sekretaris Desa	16 Januari 2019
5.	Sutikno	Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat	20 Januari 2019
6.	Iwan Setiawan	Kepala Dusun Candisari 1	15 Januari 2019
7.	Subandi	Kepala Dusun Kaliawi	19 Januari 2019
8.	Ansori	Kepala Dusun Kalipisir	18 Januari 2019
9.	Nurkholis	Kepala Dusun Tegalrejo	19 Januari 2019
10.	Teguh	Kepala Dusun Talang Bandung	19 Januari 2019
11.	Maman	Masyarakat Desa Gunungrejo	18 Januari 2019
12.	Sahra	Masyarakat Desa Gunungrejo	20 Januari 2019
13.	Ningsih	Masyarakat Desa Gunungrejo	20 Januari 2019
14.	Maryono	Masyarakat Desa Gunungrejo	15 Januari 2019
15.	Marlina	Masyarakat Desa Gunungrejo	20 Januari 2019
16.	Evi Dwiana Listiani	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	17 Januari 2019
17.	Jufri	Karang Taruna	17 Januari 2019
18.	Suratno	Badan Usaha Milik Desa	13 Januari 2019
19.	Wagirin	Gabungan Kelompok Tani	18 Januari 2019
20.	Toha	Pengusaha Jamu	15 Januari 2019

Sumber : Diolah Peneliti, 2019.

Secara keseluruhan pihak-pihak ini dianggap sudah cukup untuk mewakili ciri keseluruhan orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai topik penelitian dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang telah ditentukan. Menurut Sudarwan (2004: 193) cara melakukan wawancara yaitu: wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan skedul terstruktur, terfokus atau bebas. Skedul terstruktur adalah wawancara yang digunakan peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang spesifik dan terstruktur. Wawancara terfokus digunakan untuk tujuan memperoleh data atau opini dari responden yang bersifat khusus, seperti masalah-masalah yang sangat pribadi atau rahasia. Wawancara bebas dilakukan oleh peneliti dengan tidak menggunakan panduan khusus.

2. Observasi

Subagyo (2006:63) menjelaskan bahwa teknik observasi pada dasarnya digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang, yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut. Bagi pelaksana atau petugas atau disebut sebagai *observer* bertugas melihat obyek dan kepekaan mengungkap serta membaca permasalahan dalam momen-momen tertentu, dengan dapat memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi terhadap kegiatan

pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana maupun prasarana di Desa Gunungrejo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber informasi yang telah ada sebelumnya. Menurut Lexy J. Moleong (2012:216) dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun gambar. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.

Studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis maupun gambar yang terbitkan oleh lembaga-lembaga tertentu. Dokumen yang telah terkumpul kemudian dimanfaatkan oleh peneliti dengan cara ditafsirkan. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya berupa undang-undang, foto, dan APBDes Desa Gunungrejo.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengolah data tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini menurut Sofyan Efendi dan Tukiran (2012: 278), adalah sebagai berikut:

1. *Editing Data*, adalah proses dimana peneliti melakukan keterbacaan, konsistensi data yang sudah terkumpul. Proses keterbacaan berkaitan dengan apakah data yang sudah terkumpul secara logis dapat digunakan

sebagai justifikasi penafsiran terhadap hasil analisis. Sedangkan konsistensi mencakup keajegan jenis data berkaitan dengan skala pengukuran yang akan digunakan, sehingga kelengkapan yang mengacu pada terkumpulnya data secara lengkap dapat digunakan untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian.

2. Interpretasi Data, yaitu data yang telah dideskripsikan baik melalui tabel maupun narasi yang diinterpretasikan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Data dianalisis secara deskriptif yaitu dengan penelitian dengan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari informasinya mengenai hal-hal yang dianggap relevansi dengan tujuan penelitian.

Sugiono (2011:224) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto, dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan

yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari polanya. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti memilih dan menyeleksi serta merangkum data yang diperoleh atau difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Gunungrejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Pada dasarnya penyajian data merupakan pembagian pemahaman peneliti tentang hasil penelitian. Penyajian yang digunakan pada data yang telah direduksi yaitu disajikan dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan inti sari dari serangkaian hasil penelitian berdasarkan wawancara, observasi, serta dokumentasi hasil penelitian.

I. Teknik Keabsahan Data

Moleong (2012:326) Teknik keabsahan data merupakan salah satu teknik yang penting dalam menentukan validitas dan realibilitas data yang diperoleh dalam penelitian. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Menurut Moleong (2012:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Pada penelitian ini teknik triangulasi yang peneliti gunakan ialah yang dikembangkan oleh Denzim (dalam Moleong, 2012:330) ada empat triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, namun peneliti hanya menggunakan dua diantaranya yaitu :

1. Triangulasi metode yakni menggunakan metode seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa informan dan lingkungan setempat.
2. Triangulasi sumber yakni membandingkan dan mengecek kembali suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Umum Desa Gunungrejo

Gunungrejo awalnya merupakan salah satu pedukuhan di wilayah Desa Wates Way Ratai yang kenal dengan nama ANGLO (nama *afdeling* wilayah kerja perkebunan karet kopi Way Ratai), meliputi Dusun Totoharjo dan Dusun Gunungrejo. Sekitar pertengahan tahun tepatnya 23 Oktober 1986 Dusun Gunungrejo resmi dimekarkan dari Desa Wates Way Ratai, menjadi Desa Persiapan Gunungrejo yang terdiri dari dua belas (12) Dusun/Pedukuhan, antara lain Dusun : Kalipasir I, Kalipasir II, Gunungrejo, Kaliawi, Fajarbulan, Gunungsari, Lebaksari, Tamansari, Totoharjo, Merawan, Sidorejo dan Candipuro. Saat itu di jabat oleh Penjabat Kepala Desa BASNU MS.

Pada tahun 1990 Kepala Desa Gunungrejo di jabat oleh Penjabat sementara yaitu bapak Samsuri, pada tahun 1991 Desa Persiapan Gunungrejo ditetapkan menjadi desa Definitif (kbbi: sudah pasti, bukan untuk sementara) menjadi Desa Gunungrejo yang masih di jabat oleh Pejabat Sementara Kepala Desa Gunungrejo yaitu bapak Samsuri sampai dengan bulan September 1992. Akhir Desember 1992 Desa Gunungrejo melaksanakan pemilihan Kepala Desa yang pertama.

Tahun 2013 Desa Gunungrejo dimekarkan menjadi 3 desa, yaitu Desa Gunungrejo, Desa Mulyosari dan Desa Poncorejo, yang pada saat itu Desa Gunungrejo masih berada di Kecamatan Padang Cermin. Setelah terjadinya pemekaran desa, saat ini Desa Gunungrejo terbagi atas 9 dusun yaitu Dusun Kalipasir, Dusun Ngadirejo, Dusun Gunungrejo 1, Dusun Gunungrejo II, Dusun Kaliawi, Dusun Candisari I, Dusun Candisari II, Dusun Tegalorejo, dan Dusun Talang Bandung.

Tahun 2014, Kecamatan Padang Cermin dimekarkan menjadi tiga Kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Pembentukan Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai di Kabupaten Pesawaran, dan saat ini Desa Gunungrejo terletak di wilayah Kecamatan Way Ratai.

Tabel 5. Nama-Nama Kepala Desa di Desa Gunungrejo

No	Nama	Jabatan	Tahun
1	Basnu MS	Kepala Desa	1986-1990
2	Samsuri	Kepala Desa	1990-1992
3	Suwardi	Kepala Desa	1992-1994
4	Mulyanto	Kepala Desa	1994-2002
5	Rudi Agus Sunandar	Kepala Desa	2002-2008
6	Suranto	Kepala Desa	2009-Sekarang

Sumber: Profil Desa Gunungrejo, 2018

B. Struktur Pemerintahan Desa Gunungrejo

Struktur Pemerintahan Desa Gunungrejo terdiri dari :

1. Kepala Desa : Suranto, M.H.
2. Badan Permusyawaratan Desa : Sanarak
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat : Suprpto

4. Sekretaris Desa : Munardi
5. Kepala Urusan Keuangan : Andri Suryawan
6. Kepala Urusan Perencanaan : Eko Mulyono
7. Kepala Urusan Umum : Maya Umayati
8. Kepala Seksi Pemerintahan : Nano Suparno
9. Kepala Seksi Pelayanan : Maratus Solikhah
10. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat : Sutikno

C. Keadaan Umum Wilayah Desa Gunungrejo

1. Luas dan Batas Wilayah Desa Gunungrejo

Berdasarkan Monografi Desa Gunungrejo, luas wilayah Desa Gunungrejo adalah 1.343,41 ha, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 6. Luas Wilayah Desa Gunungrejo

Luas Pemukiman	110,95 Ha
Luas Persawahan	25,5 Ha
Luas Perkebunan	782,311 Ha
Luas Kuburan	2,2 Ha
Luas Pekarangan	311,6 Ha
Luas Perkantoran	0,1404 Ha
Total Luas	1.343,41 Ha

Sumber: Profil Desa Gunungrejo, 2018

Desa Gunungrejo berbatasan dengan Desa Poncorejo, Desa Mulyosari, Desa Babakan Loa, dan Hutan kawasan, penjelasan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 7. Batas Wilayah Desa Gunungrejo

Batas	Desa/Wilayah	Kecamatan
Sebelah Utara	Hutan kawasan	-
Sebelah Selatan	Poncorejo	Way Ratai
Sebelah Timur	Mulyosari	Way Ratai
Sebelah Barat	Babakan Loa	Kedondong

Sumber: Profil Desa Gunungrejo, 2018.

Desa Gunungrejo terdiri dari 9 Dusun dan 18 Rukun Tetangga (RT), Desa Gunungrejo dibagi menjadi 9 Dusun, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 8. Dusun-Dusun di Desa Gunungrejo

No	Nama Dusun	Jumlah Kepala Keluarga (KK)
1	Kalipasir	85
2	Ngadirejo	93
3	Gunungrejo I	131
4	Gunungrejo II	127
5	Candisari I	69
6	Candisari II	101
7	Tegalrejo	113
8	Kaliawi	118
9	Talang Bandung	36

Sumber: Profil Desa Gunungrejo, 2018

2. Orbitrasi Desa Gunungrejo

Jarak tempuh dari Desa Gunungrejo ke pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) Jarak Pemerintahan Desa Gunungrejo dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan Way Ratai yaitu 7 kilometer
- 2) Jarak Pemerintahan Desa Gunungrejo dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Pesawaran yaitu 30 kilometer
- 3) Jarak Pemerintahan Desa Gunungrejo dengan Pusat Pemerintahan Ibukota Provinsi 61 kilometer.

D. Keadaan Penduduk Desa Gunungrejo

1. Keadaan umum penduduk

Jumlah penduduk di Desa Gunungrejo pada tahun 2018 adalah 3.328 jiwa dan terbagi menjadi 873 kepala keluarga, dengan kepadatan penduduk sebesar 0,40 kilometer (KM)/jiwa. jumlah penduduk 3.328 jiwa terdiri dari 1.740 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.588 jiwa berjenis kelamin perempuan. Secara terperinci jumlah penduduk Desa Gunungrejo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Jumlah Penduduk Desa Gunungrejo

No	Jenis	Jumlah
1	Laki-Laki	1.740 jiwa
2	Perempuan	1.588 jiwa
3	Total Penduduk	3.328 jiwa
4	Kepala Keluarga	873 KK
5	Kepadatan Penduduk	0,40 KM/Jiwa

Sumber: Profil Desa Gunungrejo, 2018.

Berdasarkan tabel 9. jumlah penduduk di Desa Gunungrejo diatas, dapat dilihat bahwa penduduk di Desa Gunungrejo didominasi oleh penduduk Laki-laki dibanding dengan penduduk Perempuan.

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

Agama yang dianut oleh masyarakat di Desa Gunungrejo terdiri dari 2 (dua) agama yaitu agama Islam dan Kristen. Mengenai jumlah penduduk di Desa Gunungrejo berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama yang dianut

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1.	Islam	1548	1497
2.	Kristen	7	4

Sumber: Profil Desa Gunungrejo, 2018

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Desa Gunungrejo beragama Islam dengan jumlah 3.045 jiwa, dan beragama Kristen sebanyak 11 jiwa.

3. Keadaan Penduduk Menurut Golongan Umur

Keadaan Penduduk Desa Gunungrejo berdasarkan golongan umur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11. Jumlah Penduduk berdasarkan Golongan Umur

No	Golongan Umur	Jumlah Jiwa
1.	0 – 17 Tahun	903
2.	18 - 55 Tahun	1.936
3.	55 Tahun keatas	433
Jumlah		3.328

Sumber: Profil Desa Gunungrejo, 2018.

Pada tabel 11 dapat dilihat bahwa penduduk di Desa Gunungrejo didominasi oleh penduduk berusia 18-55 tahun berjumlah 1.936 jiwa. Sedangkan penduduk yang berusia 0-17 tahun berjumlah 903 jiwa. Kemudian penduduk yang berusia 55 tahun keatas berjumlah 433 jiwa.

4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Penduduk Desa Gunungrejo sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh tani, dan yang lainnya bekerja sebagai buruh migran, pegawai

negeri sipil, pedagang keliling, montir, pembantu rumah tangga, karyawan perusahaan pemerintah dan pengusaha kecil dan menengah. Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Jenis Mata Pencaharian	Laki-Laki	Perempuan
1.	Petani	626	266
2.	Buruh Tani	101	71
3.	Buruh Migran	-	2
4.	Pegawai Negeri Sipil	9	5
5.	Pedagang Keliling	11	6
6.	Montir	4	-
7	Pembantu Rumah Tangga	-	44
8	Karyawan Perusahaan Pemerintah	8	7
9	Pengusaha Kecil dan Menengah	11	6

Sumber: Profil Desa Gunungrejo, 2018.

Pada tabel 12, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Gunungrejo sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai Petani dengan jumlah 626 laki-laki dan 266 perempuan. Sedangkan yang paling rendah jumlahnya ialah mata pencaharian sebagai buruh migran yaitu sejumlah 2 jiwa.

E. Sarana dan Prasarana Desa Gunungrejo

Desa Gunungrejo mempunyai sarana dan prasarana yaitu :

- a. Prasarana transportasi terdiri dari jalan desa sepanjang 2 km, jalan kabupaten sepanjang 5 km, jalan provinsi 7 km.
- b. Prasarana peribadatan terdiri dari 10 masjid dan 5 langgar/musholla.
- c. Prasarana kesehatan terdiri dari 1 unit puskesmas pembantu, dan 2 unit posyandu.

- d. Prasarana pendidikan terdiri dari 1 perpustakaan desa, 3 gedung sekolah dasar (SD), 2 gedung sekolah menengah pertama (SMP), dan 2 gedung sekolah menengah atas (SMA).
- e. Prasarana air bersih terdiri dari 118 unit sumur gali dan 2 unit hidran umum.
- f. Prasarana Sanitasi dan Irigasi terdiri dari 3 unit MCK umum, 600 unit jamban keluarga, saluran drainase, dan saluran irigasi sepanjang 803 meter.

F. Kelembagaan

Terdapat beberapa kelembagaan di Desa Gunungrejo, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13. Kelembagaan di Desa Gunungrejo

No.	Nama Lembaga	Pengurus	Jenis kegiatan
1	LPM	12	5
2	PKK	4	24
3	BUMDES	7	5
4	Karang Taruna	29	4
5	RT/RW	18 RT/0 RW	-

Sumber : Profil Desa Gunungrejo, 2018.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ada beberapa kelembagaan yang ada di Desa Gunungrejo, penjelasan sebagai berikut :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dengan pengurus sebanyak 12 orang dan lingkup kegiatan sebanyak 5 jenis.
2. Pembinaan kesejahteraan Keluarga (PKK), dengan pengurus sebanyak 4 orang dan lingkup kegiatan sebanyak 24 jenis.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dengan pengurus sebanyak 7 orang dan jenis kegiatan sebanyak 5 jenis.
4. Karang Taruna, dengan jumlah pengurus sebanyak 29 orang dan jenis kegiatan sebanyak 4 jenis.
5. RT/RW, tidak ada RW dan ada 18 RT

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), diantaranya dilakukan dengan cara membentuk kelompok masyarakat, membuka wisata, membentuk BUMDes, memberikan motivasi dan edukasi kepada masyarakat dan kelompok masyarakat dalam bentuk sosialisasi-sosialisasi, memberikan dorongan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat berupa bantuan, mendorong setiap dusun untuk memiliki dana kas dusun, dan memberikan tugas kepada setiap kepala urusan (kaur) membina dua dusun.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagi aparatur dan lembaga-lembaga desa, dan meningkatkan pendidikan aparatur desa kejenjang perguruan tinggi. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yaitu dengan penyediaan sarana air bersih, dan posyandu, jamkesmas dan pembangun jamban. Membuka akses-akses kemajuan ekonomi bagi

masyarakat yaitu sebagian program-program pemberdayaan masyarakat, pasar desa dan wisata air terjun serta melalui BUMDes. Membangun sarana dan prasarana diantaranya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas wisata, fasilitas pemberdayaan dan infrastruktur. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, melalui musyawarah dusun (musdus), dan musyawarah ditingkat desa.

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi, program-program pemberdayaan yang dilakukan sebagian besar berkembang. Pemerintah Desa Gunungrejo dalam upaya melindungi pemberdayaan yaitu dengan membuat aturan-aturan dan kesepakatan-kesepakatan bersama masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, ada beberapa saran yang peneliti berikan, diantaranya yakni :

1. Pemerintah Desa Gunungrejo perlu meningkatkan lagi kesadaran masyarakat dengan memberikan edukasi/pemahaman lebih intensif melalui sosialisasi/tatap muka secara bertahap kepada masyarakat yang kurang berdaya, khususnya masyarakat yang berada di dusun pedalaman.
2. Pemerintah Desa Gunungrejo perlu meningkatkan lagi kemampuan kepemimpinan aparatur desa khususnya kepala dusun dengan mengadakan pelatihan tentang kepemimpinan, supaya program

pemberdayaan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik di semua dusun sehingga dapat dirasakan semua masyarakat.

3. Pemerintah Desa Gunungrejo perlu melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi khususnya dibidang perikanan untuk mengadakan pelatihan terkait pemberdayaan yang tidak berkembang yaitu pemberdayaan budidaya ikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Patisipatif*. Graha Ilmu, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Efendi, Sofian dan Tukiran. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta, bandung.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, bandung.
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama, bandung.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarwan, Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sumaryo dan Kordiyana. 2015. *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Theresia, Aprilia, dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Alfabeta, Bandung.

Jurnal /Skripsi :

Almasri dan Devi Deswimar. 2014. *Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pembangunan Pedesaan.*

Arsiyah. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa.*
WACANA. Volume 12 Nomor 2.

Ulumiyah, Ita, dkk. 2013. *Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa.* Jurnal Administrasi Publik. Volume 1, Nomor 5.

Baura, Juiska, dkk. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa.*

Wurangian, Mikhael. 2015. *Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat.* Jurnal Ilmu Pemerintahan.

Web :

<https://gunungrejo.desa.id>

Administrator. 2017. *Desa Buding Raih Juara 2 Lomba Desa Tingkat Nasional Regional Wilayah 1 Sumatera, (www.babelprov.go.id/content/desa-buding-raih-juara-2-lomba-desa-tingkat-nasional-regional-wilayah-1-sumatera)*

Administrator. 2017. *Desa Toapaya Selatan dan Kelurahan Toapaya Asri Raih Juara III Desa Terbaik Tingkat Nasional Wilayah 1 Sumatera Tahun 2017, (bintankab.go.id/master/desa-toapaya-selatan-dan-kelurahan-toapaya-asri-raih-juara-III-desa-terbaik-tingkat-nasional-wilayah-1-sumatera-tahun-2017/)*

Administrator. 2017. *Gubernur Terima Penghargaan Juara Lomba Desa Tingkat Nasional, (lampungprov.go.id/berita/gubernur-terima-penghargaan-juara-lomba-desa-tingkat-nasional.html)*

Administrator. 2018. *261 Desa Tertinggal Terentaskan Berkat Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung*, (dpmd.lampungprov.go.id/detailberita/261-desa-tertinggal-terentaskan-berkat-gerbang-desa-saburai-provinsi-lampung#)

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2018. *Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung bulan Maret 2018 mencapai 13,14 persen*, (<https://lampung.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/583/persentase-penduduk-miskin-provinsi-lampung-bulan-maret-2018-mencapai-13-14-persen.html#>)

RM. 2018. *Apa Yang Dinilai Dan Untuk Apa Lomba Desa Sebenarnya?*, (<https://www.rakyatmuria.com/2018/03/28/apa-yang-dinilai-dan-untuk-apa-lomba-desasebenarnya/>).

Dokumen

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Desa

Profil Desa Gunungrejo

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungrejo

Gambar Kegiatan Desa Gunungrejo